



Pantau Kejadian Cukup di Ruangan

Pemkot Yogyakarta Ciptakan Smart Room Tahun Depan

Ketika ada yang parkir sembarangan dan mengganggu pengguna jalan maupun arus lalu lintas di Kota Yogyakarta, dari smart room akan langsung memberikan komando kepada oknum di lapangan untuk tidak parkir di titik tersebut

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta berencana membuat smart room pada 2019 mendatang. Smart room yang dimaksud tidak lepas dari upaya Kota Yogyakarta mengukuhkan diri sebagai smart city dengan berbagai aspek di dalamnya nanti yang dapat terintegrasi.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelaskan, konsep smart room sebenarnya merupakan tempat sistem informasi dan menjadi ruangan komando atas berbagai hal yang terjadi di Kota Yogyakarta, baik di dalam lingkungan Pemkot maupun yang ada di masyarakat.

"Jadi di sana kami mengintegrasikan beberapa informasi dan juga melakukan fungsi pengawasan dan juga segala bentuk komando bisa dilakukan dari sana," ujarnya, usai workshop penguatan implementasi smart city di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (14/8).

● ke halaman 19

Instansi	Nilai
1. Bappeda	<input type="checkbox"/> Negatif
2. Din. Kominfosandi	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

Netral
 Biasa
 Bunkah Diketahui

Pantau Kejadian Cukup

● Sambungan Hal 13

Ia memberikan contoh, misalkan terkait kondisi parkir yang dapat dipantau melalui closed circuit television (CCTV).

"Ketika ada yang parkir sembarangan dan mengganggu pengguna jalan maupun arus lalu lintas di Kota Yogyakarta, dari smart room akan langsung memberikan komando kepada oknum di lapangan untuk tidak parkir di titik tersebut," tuturnya.

"Tapi tidak hanya itu. Masyarakat nantinya tidak akan bisa melakukan kejahatan. Semua bisa direwind. Bisa diputar ke belakang. Pelaku usaha kami harap bisa ikut berpartisipasi dengan menyediakan CCTV, sehingga semakin banyak titik yang bisa terpantau melalui smart room," bebernya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastana lebih jauh menjelaskan, smart room nantinya menjadi tempat yang dapat menjadi alat bantu untuk mengambil kebijakan di Kota Yogyakarta.

"Dalam ruangan tersebut, nanti akan ada yang standar seperti visualisasi Kota Yogyakarta, progres, dan apa yang sudah jadi komitmen. Misalkan data pergerakan realisasi keuangan dan kegiatan," bebernya.

Selain itu, lanjutnya, data yang terpampang di smart room juga tentang dinamik data berbasis kewilayahan. Termasuk terhadap apa yang saat itu menjadi public interest warga Kota Yogyakarta, baik melalui media mainstream maupun media sosial.

"Bisa kita lihat dari apa yang beredar di media. Bagaimana kita melihat kecenderungan interest masyarakat." Sehingga nantinya semua pengambilan keputusan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta berbasis data dan tersedia di smart room," ujarnya.

Smart city istimewa

Sementara itu, pada saat pemaparan terkait penguatan implementasi smart city Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edy Muhammad menjelaskan, smart city yang ada di Yogyakarta akan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan kekhlasan Kota Yogyakarta.

"Ada empat hal penting dalam smart city yang ada di Yogyakarta yakni pendidikan, pariwisata, budaya, dan pusat pelayanan jasa. Keempatnya dielaborasi menjadi smart city Yogyakarta dan keistimewanya," ungkapnya.

Ia pun berharap, para peserta yang hadir dalam acara tersebut yakni Kepala OPD, camat, serta lurah mampu memahami latar belakang tuntutan internal dan eksternal dalam pengembangan smart city.

"Saya berharap agar bisa memahami bahwa Kepala OPD dan unit kerja memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap terwujudnya smart city," tegasnya. (kur)

Belum Ada Smart City di Indonesia

SMART City and Community Living Lab, Prof Suhono Harso Supangkat menjelaskan, dalam mewujudkan smart city dibutuhkan pemahaman dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait dan juga perlunya kepemimpinan. Semua komponen yang terlibat dalam smart city harus selalu berpikir tentang *people, process, dan technology*.

● ke halaman 19

Belum Ada Smart City

● Sambungan Hal 13

"Salah satu komponen tersebut tidak dipenuhi, maka semua program kemungkinan akan gagal," ujarnya, saat pemaparan penguatan implementasi smart city Pemerintah Kota Yogyakarta, di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Selasa (14/8).

Suhono menjelaskan, sejauh ini di Indonesia belum ada kota yang benar-benar menjadi smart city. Ketika sebuah kota sudah menjadi smart city, masalah seperti macet dan banjir tidak akan terjadi lagi.

"Adapun ukuran untuk menjadi smart city meliputi dua hal, yakni indikator kualitas hidup dan indikator proses pengembangan kota cer-

das," ungkapnya.

Indikator kualitas hidup, lanjutnya, mengukur hasil akhir dari berbagai upaya yang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup. Sementara indikator proses pengembangan smart city mengukur sejauh mana proses pengembangan kota, baik Pemkot dan stakeholder lainnya, secara efektif, efisien, terintegrasi, berkelanjutan, dan terukur untuk menghasilkan layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

Guru besar ITB tersebut menambahkan, berdasarkan hasil pengukuran, belum ada kota di Indonesia yang mencapai ideal smart city. Beberapa kota sudah memasuki level integrasi walau masih membangun secara scattered maupun di tahap memulai (initiative).

"Kalau dari hasil pengukuran untuk kriteria khusus, Kota Yog-

yakarta sudah berada di atas rata-rata. Hanya ada satu kriteria yang berada di bawah rata-rata yakni kesiapan integrasi atau integratif readiness," tandasnya.

Integrasi sistem informasi pemerintahan, lanjutnya, dilakukan agar seluruh data dan informasi yang digunakan pimpinan daerah pada saat mencanangkan suatu kebijakan dilakukan berdasarkan data terkini sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan bermanfaat serta menghindari adanya duplikasi data.

"Data menjadi akurat, lengkap, akuntabel, dan mudah diakses. Selain itu, pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan menjadi efektif. Serta juga adanya integrasi antar-instansi terkait, baik internal maupun eksternal," katanya. (kur)

Dukung Pembangunan Berbasis Kewilayahan

PEMERINTAH Daerah (Pemda) DIY menilai konsep *smart province* bisa mendukung pembangunan berbasis kewilayahan. Namun, untuk menuju ke arah itu, DIY harus diberlakukan sebagai satu kesatuan bentang ruang ekologis dan terintegrasi.

Gubernur DIY, Sri Sultan Ha-

mengku Buwono X, mengatakan implikasinya, program bersama di tingkat provinsi, harus didukung oleh kesepakatan antarkepala daerah, di mana perlakuan pembangunan di setiap wilayah kabupaten-kota perlu diselenggarakan.

● ke halaman 19

dari Government Digital Services (DGS), yang selama ini bersifat horizontal.

"Ya, selama ini masih bersifat horizontal, pada masing-masing OPD DIY dan belum terkoneksi antar-OPD DIY, maupun dengan OPD Kabupaten-Kota," ucapnya.

Lebih lanjut, Sultan mengemukakan, dalam usaha mewujudkan JSP, dibutuhkan partisipasi *multi-stakeholders*, masyarakat yang cerdas, dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis berkesinambungan, serta kemitraan yang berbobot.

"Guna mendukung keperluan itu, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur ICT yang berkualitas dan terintegrasi dari beragam sektor, sehingga pengawasan data dan pelayanan bisa berjalan stimulan," ucapnya.

Faktor budaya

Menurutnya, faktor kesuksesan provinsi cerdas adalah faktor budaya yang paling elementer.

Yaitu, tertib lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di ruang publik, menjaga fasilitas publik, serta hidup selaras dengan lingkungan. Sebab, provinsi cerdas merupakan cerminan warganya.

"Pada pokoknya, JSP harus didukung oleh ekosistem kultural berbasis digital yang memerlukan *roadmap* sebagai penunjuk, sekaligus pengingat, perlunya akselerasi implementasi rencana pembangunan JSP," tandasnya.

Sultan menjelaskan, dalam tahap pengembangan bisa mencakup dimensi *smart province* dengan konsep berbeda, yaitu *smart governance, smart healthcare, smart building, smart mobility and infrastructure, smart technology, smart energy, dan smart citizen*.

"Yang terakhir dan terpenting, harus ada kolaborasi, koordinasi dan sinergi dengan Jogja Smart Province dan keempat Smart Regencies," katanya. (aka)

"Jadi, harus saling memiliki tanggung ekologis dan ruang ekologis dengan yang lain," katanya, di sela seminar hasil penyusunan *masterplan* Jogja Smart Province (JSP), di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Selasa (14/8).

Di samping itu, dibutuhkan pula strategi silang yang efektif, merujuk pada visi DIY 2017-2022. Strategi silang itu, terdiri atas silang ekonomi, silang keuangan wilayah dan silang budaya. Untuk pelaksanaannya, dijalankan di bawah regional manajemen Gubernur DIY dan disepakati kabupaten-kota.

Hal-hal semacam itu, tambah Ngarsa Dalem, akan menjadi fokus JSP untuk mengakomodasi lintas layanan Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten-kota sebagai pengembangan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005